



Analisis Empiris Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan Terhadap Reaksi Pasar

Mohe Nur Cahyo^a, Sulhani^b

^{ab}Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia

*Corresponding author: mohenurcahyo@yahoo.co.id

<https://doi.org/10.24815/JDAB.V4I2.7704>

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 8 June 2017

Received in revised form: 29 July 2017

Accepted: 2 October 2017

Available online: 20 October 2017

Keywords:

Audit committee, fraud, internal audit, market reaction and whistleblowing system.

ABSTRACT

This study was conducted to obtain answer for four research questions: (1) whether the effectiveness of audit committee affected whistleblowing system, (2) whether the effectiveness of internal audit affected whistleblowing system, (3) whether whistleblowing system affected fraud disclosure, and (4) whether fraud disclosure affected market reaction. This research was analyzed using Structural Equation Modeling SEM with PLS model. The samples were 57 companies that listed on the IDX in year 2014. Results of the study were summarized as follow: (1) The effectiveness of audit committee had negative significant effect on whistleblowing system, (2) The effectiveness of internal audit did not have effect on whistleblowing system, (3) whistleblowing system did not have effect on fraud disclosure, and (4) fraud disclosure had negative significant effect on stock market reaction. The implication of this research is that the company should encourage the implementation of whistleblowing system as an effective early fraud prevention system, hence the number of fraud will decrease.

©2017 FEB USK. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Menurut survei yang dilakukan oleh Ernst & Young pada tahun 2012 baik perusahaan di negara maju maupun negara berkembang menghadapi risiko kecurangan (*fraud*) yang tinggi. Hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa *fraud* berdampak kerugian secara global hingga 3,7 juta dollar. Sedangkan menurut survey yang dilakukan oleh ACFE & Ernst and Young (2016), Indonesia sebagai *emerging market* masih memiliki risiko *fraud* yang sangat tinggi. Menurut survey tersebut korupsi dan penyalahgunaan asset merupakan

jenis kecurangan yang sering terjadi pada kasus perusahaan di Indonesia. Hasil survey tersebut mendukung hasil penelitian Siregar & Tenoyo (2015) bahwa kecurangan merupakan ancaman utama dalam praktik bisnis di Indonesia. Selain itu penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa lemahnya *internal control* dan kurangnya komitmen dalam penerapan kode etik perusahaan merupakan penyebab utama tingginya kasus kecurangan di Indonesia. Melihat tingginya kasus terjadinya kecurangan dan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan, maka diperlukan suatu mekanisme pencegahan kecurangan yang sistematis. Salah satu mekanisme

pengecambahan kecurangan di Indonesia yang digagas oleh Komite Nasional Kebijakan Governance adalah penerapan *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan mekanisme pencegahan kecurangan melalui pengungkapan kecurangan secara dini dengan melibatkan peran aktif semua elemen organisasi (Pillay et al. 2012). Menurut survei yang dilakukan oleh Waldron pada tahun 2012 mayoritas kecurangan dalam suatu organisasi dapat dideteksi melalui *whistleblowing system*. Namun *whistleblowing system* yang efektif memerlukan dukungan struktur tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (National Audit Office 2014; Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Struktur tata kelola perusahaan yang berperan besar dalam penerapan *whistleblowing system* adalah komite audit dan audit internal (Davidson et al. 2008 ;Coram et al. 2008). Dengan dukungan peran struktur tata kelola perusahaan diharapkan *whistleblowing system* dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengungkapkan kecurangan di perusahaan (Davidson et al. 2005; Coram et al. 2008; Ali 2014). Dengan demikian komite audit dan audit internal berfungsi terhadap pengawasan pelaksanaan *whistleblowing system* suatu perusahaan (National Audit Office 2014; Chartered Institute of Internal Auditors 2014). Semakin efektif komite audit dan audit internal maka pengungkapan kecurangan pada laporan tahunan akan semakin baik.

Pengungkapan kecurangan dalam laporan tahunan perusahaan mengakibatkan perusahaan akan menghadapi risiko menurunnya tingkat kepercayaan investor (Farber 2005). Menurut survei yang dilakukan oleh Deloitte (2014) kecurangan merupakan salah satu faktor etika yang sangat mempengaruhi risiko reputasi dunia bisnis. Lebih lanjut menurut Christensen et al. (2010) reaksi pasar saham mengalami penurunan seiring dengan terungkapnya kasus kecurangan di perusahaan. Penurunan nilai saham menyebabkan turunnya persepsi para investor terhadap perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian

Brazel et al. (2015) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan kecurangan berpengaruh pada persepsi para investor dalam melakukan penilaian risiko investasi. Laporan tahunan mengungkap kecurangan dapat menjadi pertanda khusus yang harus diperhatikan para investor untuk berinvestasi (*red flag*).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melihat bahwa model hubungan struktur tata kelola, karakteristik komite audit, *whistleblowing system*, dan pengungkapan kecurangan terhadap reaksi pasar saham merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti, selain itu tema-tema tentang *whistleblowing system* dan kecurangan masih jarang diteliti dalam bidang akuntansi di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis empiris hubungan *good corporate governance*, *whistleblowing system*, kecurangan dan reaksi pasar.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Good Corporate Governance dan Whistleblowing

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) *good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terwujudnya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan. Asas-asas *good corporate governance* harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Asas-asas tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas-asas tersebut diperlukan untuk mencapai keberlanjutan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Menurut penelitian Zvavahera, et al (2014) Corporate Governance yang baik akan mendorong perilaku moral yang baik semua karyawan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) penerapan *good corporate governance* dapat mendorong pelaksanaan sistem pengendalian internal salah satunya ialah melalui *whistleblowing system*. *Whistleblowing*

(pelaporan pelanggaran) merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan.

Dalam praktik *whistleblowing system* pada suatu entitas, perlindungan terhadap para *whistleblower* merupakan prosedur yang sangat penting. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya *good corporate governance* yang optimal. *Good corporate governance* yang optimal memerlukan pengawasan dan pengelolaan pelaksanaannya oleh struktur organisasi perusahaan. Fungsi pengawasan *good corporate governance* dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui komite-komite yang di bawahnya. Salah satu komite yang bertanggung jawab sebagai fungsi pengawasan pelaksanaan *whistleblowing system* ialah Komite Audit (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Selain itu, audit internal juga berperan mewujudkan *good corporate governance* dengan melaksanakan prosedur *whistleblowing system* berjalan secara efektif dan melaporkannya kepada anggota Dewan Komisaris melalui Komite Audit (Chartered Institute of Internal Auditors, 2014).

Kecurangan (*Fraud*)

Menurut SAS No.99 Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh seseorang yang dapat menyebabkan kesalahan material pada laporan keuangan. Teori *fraud* pertama kali dikembangkan oleh Cressey 1953 melalui teori *fraud triangle*. *Fraud triangle* menyebutkan bahwa ada tiga penyebab terjadinya kecurangan yaitu *opportunitiy*, *pressure*, dan *rationalization*, sedangkan komite Nasional Kebijakan Governance (2008) menyatakan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan, karyawan, maupun orang lain. Kecurangan meliputi pencucian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan, menyembunyikan

atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak luar perusahaan. Kecurangan dapat dicegah melalui pengelolaan pengendalian internal perusahaan. Salah satu sarana pengendalian internal ialah *whistleblowing system*. Menurut survei yang dilakukan oleh Waldron pada tahun 2012 bahwa mayoritas kecurangan dilaporkan melalui *whistleblowing system*. Praktik kecurangan yang dilaporkan tersebut menjadi deteksi dini manajemen perusahaan untuk mencegah kecurangan yang berkelanjutan (Komite Nasional Kebijakan Governance 2008, Khan et al. 2014).

Reaksi Pasar

Menurut Scott (2015) setiap informasi yang disampaikan oleh perusahaan akan menjadi pertimbangan yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga setiap pengungkapan informasi secara sukarela akan memiliki dampak kepada pasar selama informasi tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Informasi terkait kecurangan yang terjadi pada perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan investasi para investor (Farber, 2005; Christensen et al., 2010; Firth, 2011; Hui, 2014; Brazel et al., 2015). Tingkat kepercayaan investasi tersebut akan berpengaruh pada reputasi perusahaan di pasar saham. Reputasi tersebut berupa reaksi pasar saham terhadap saham perusahaan yang beredar (Association of Certified Fraud Examiners 2014; Deloitte, 2014). Praktik kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan akan berdampak pada menurunnya reaksi pasar saham perusahaan (Farber, 2005; Bhana, 2010; Firth, 2011). Pengungkapan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan juga akan berdampak pada reaksi investor terhadap informasi pengungkapan tersebut.

Reputasi perusahaan dalam beberapa penelitian ini diprosikan sebagai *abnormal return* (Brown & Warner, 1980; McKinley, 1997; Budiyanto et al., 2006). *Abnormal return* ialah

selisih antara *return* saham sesungguhnya (*actual return*) dengan *return* saham yang diharapkan (*expected return*) (Budiyanto et al., 2006). Terdapat tiga model dalam estimasi *expected return* yaitu: *mean adjusted model*, *market model*, dan *market adjusted model* (Brown & Warner, 1980).

Pengembangan Hipotesis

Karakteristik komite audit terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*

Struktur komite audit yang efektif sangat diperlukan demi tercapainya pelaksanaan *whistleblowing system* secara optimal (Perks & Smith, tanpa tahun; Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Menurut Ali (2014) struktur Komite Audit yang efektif terdiri dari anggota independen, anggota yang ahli bidang keuangan, dan kehadiran rapat yang signifikan.

Keberadaan anggota komite audit yang independen dapat menurunkan praktik kecurangan (Abbott et al., 2000; Davidson et al., 2005; Lee & Fargher, 2012; Kamarudin, 2014). Anggota komite audit yang independen dapat memanfaatkan *whistleblowing system* sebagai sarana pencegahan kecurangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Lee & Fargher (2012) yang menyimpulkan bahwa anggota Komite Audit yang independen berpengaruh positif terhadap peningkatan pelaksanaan *whistleblowing system* untuk mendeteksi kecurangan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komite audit harus memiliki anggota yang ahli dalam bidang keuangan untuk meningkatkan pengawasan perusahaan. Pengawasan pada perusahaan yang semakin meningkat berdampak pada pengendalian internal yang semakin baik dan penurunan praktik kecurangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. (2007) dan Huang & Thiruvadi (Tanpa Tahun) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang baik mampu menurunkan praktik kecurangan apabila memiliki anggota Komite Audit yang ahli

dalam bidang keuangan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Barua et al. (2010) anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dapat menjadi substitusi anggaran audit internal dalam pengendalian internal. Hal tersebut menunjukkan anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Demikian pula *whistleblowing system* yang merupakan bagian dari pengendalian internal.

Pengawasan pada pelaksanaan *whistleblowing system* perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mencegah praktik kecurangan secara optimal. Pengawasan secara berkelanjutan dapat terlihat pada jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh Komite Audit. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh anggota komite audit mempengaruhi peningkatan pengendalian internal dan mampu menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (Abbott et al., 2000; Barua, 2010). Kemudian menurut National Audit Office (2014) komite audit perlu melakukan peninjauan proses *whistleblowing system* secara terus-menerus untuk mengevaluasi pelaksanaannya agar semakin optimal dalam pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*.

Karakteristik Audit Internal terhadap Pelaksanaan *Whistleblowing System*

Pelaksanaan pengendalian internal yang optimal mampu mendeteksi indikasi praktik kecurangan secara dini (Coram et al., 2008; Protiviti, 2009). *Whistleblowing system* yang merupakan bagian dari pengendalian internal juga mampu mendeteksi praktik kecurangan melalui laporan yang diterima dari para *whistleblower*. Hal ini didukung hasil survey yang dilakukan oleh Waldron pada tahun 2012 menunjukkan bahwa mayoritas laporan yang diterima melalui *whistleblowing system*

berindikasi adanya praktik kecurangan. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar laporan dalam *whistleblowing system* ditangani oleh bagian audit internal perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Read & Rama (2003) menyimpulkan bahwa audit internal merupakan pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan *whistleblowing system*. Audit internal akan melakukan audit investigatif atas laporan-laporan yang terindikasi adanya praktik kecurangan (*fraud*) dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Komite Audit (Perry et al., 2007; Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006; Chartered Institute of Internal Auditors, 2014; National Audit Office (2014). Pelaksanaan audit investigatif oleh audit internal memerlukan keahlian dalam bidang audit baik secara keuangan maupun non-keuangan agar memperoleh hasil audit yang optimal (Davies 2009). Keahlian dalam bidang audit dapat diberikan kepada auditor internal melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penilaian risiko *fraud* (Sanusi 2015). Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Karakteristik audit internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*.

Pelaksanaan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Kecurangan

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) *whistleblowing system* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk pengungkapan kecurangan di perusahaan, sedangkan Global Corporate Governance Forum (2007); Chartered Institute of Internal Auditors (2014) menyatakan bahwa *whistleblowing system* mampu mendeteksi mayoritas *fraud* dalam suatu organisasi. *Whistleblowing system* merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk memperingatkan pihak manajemen mengenai kecurangan dalam perusahaan. Pengungkapan kecurangan (*fraud*) tersebut menjadi deteksi dini manajemen

perusahaan untuk mencegah *fraud* yang berkelanjutan (Khan et al., 2014).

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Robinson et al. (2012) terkait dengan hubungan *whitelblowing system* dengan pengungkapan *fraud* menyimpulkan bahwa para *whistleblower* cenderung hanya akan melaporkan *fraud* yang material namun *whistleblower* cenderung untuk melaporkan kecurangan jika terdapat perlindungan pelapor. Perlindungan pelapor merupakan bagian yang harus ada dalam *whistleblowing system*. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Pelaksanaan *whistleblowing system* berpengaruh positif pada pengungkapan kecurangan.

Pengungkapan Kecurangan terhadap Reputasi Perusahaan di Pasar Saham

Kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dapat berdampak buruk pada kepercayaan investor, hal ini dikarenakan kecurangan merupakan indikasi tidak baik dari pengelolaan perusahaan. Association of Certified Fraud Examiners (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang terindikasi kasus kecurangan akan mengakibatkan penurunan reputasi bisnisnya sehingga berdampak pada kerugian perusahaan, sedangkan Survei yang dilakukan oleh Deloitte (2014) menyimpulkan bahwa kecurangan merupakan salah satu faktor etika yang sangat mempengaruhi risiko reputasi dunia bisnis yang dapat berdampak pada kerugian perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa indikasi kecurangan pada suatu perusahaan mempengaruhi reputasi perusahaan di pasar saham. Reputasi tersebut berupa reaksi pasar saham terhadap saham perusahaan yang beredar (Association of Certified Fraud Examiners, 2014; Deloitte, 2014). Kecurangan yang terungkap pada suatu perusahaan akan berdampak pada turunnya kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan (Farber, 2005; Christensen et al., 2010; Firth,

2011; Hui, 2014; Brazel et al., 2015). Penurunan kepercayaan investor akan berdampak pada reaksi negatif pasar saham perusahaan tersebut (Farber, 2005; Bhana, 2010; Firth, 2011). Reaksi pasar akan semakin membaik apabila perusahaan melakukan upaya pencegahan kecurangan di masa mendatang (Farber, 2005).

Penelitian Brazel et al., (2015) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan kecurangan dan penggunaan informasi laporan keuangan berpengaruh pada persepsi para investor dalam melakukan penilaian risiko investasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Christensen et al., (2010) menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang terindikasi kasus kecurangan mengalami penurunan pada reaksi pasar sahamnya. Sehingga hipotesis ke empat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Pengungkapan kecurangan berpengaruh negatif pada reputasi perusahaan dalam pasar saham.

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data

sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan yang menjadi sampel. Data tersebut berupa dokumen yang dapat diunduh dalam halaman *website* perusahaan terkait maupun dalam situs Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data harga saham perusahaan juga dapat diperoleh dalam situs Bursa Efek Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Kemudian dalam pengambilan sampel dari populasi menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan mengeliminasi anggota populasi yang tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam variabel yang diperlukan. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) perusahaan melaporkan laporan tahunan audited tahun 2014, (2) Perusahaan melaporkan pelaksanaan *whistleblowing system* (3) perusahaan mengungkap laporan terkait komite audit dan internal audit perusahaan. Penelitian ini menggunakan 57 sampel dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014.	441
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan 2014.	(4)
3	Perusahaan yang tidak melaporkan pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> .	(261)
4	Perusahaan yang tidak melaporkan pengungkapan kecurangan.	(93)
5	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi mengenai Komite Audit secara lengkap.	(2)
6	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi mengenai audit internal secara lengkap.	(24)
7	Informasi saham beredar perusahaan yang tidak tersedia di pasar saham.	(0)
Sampel perusahaan yang diperoleh		57

Sumber: Data sekunder yang telah diolah dengan Microsoft Excel

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

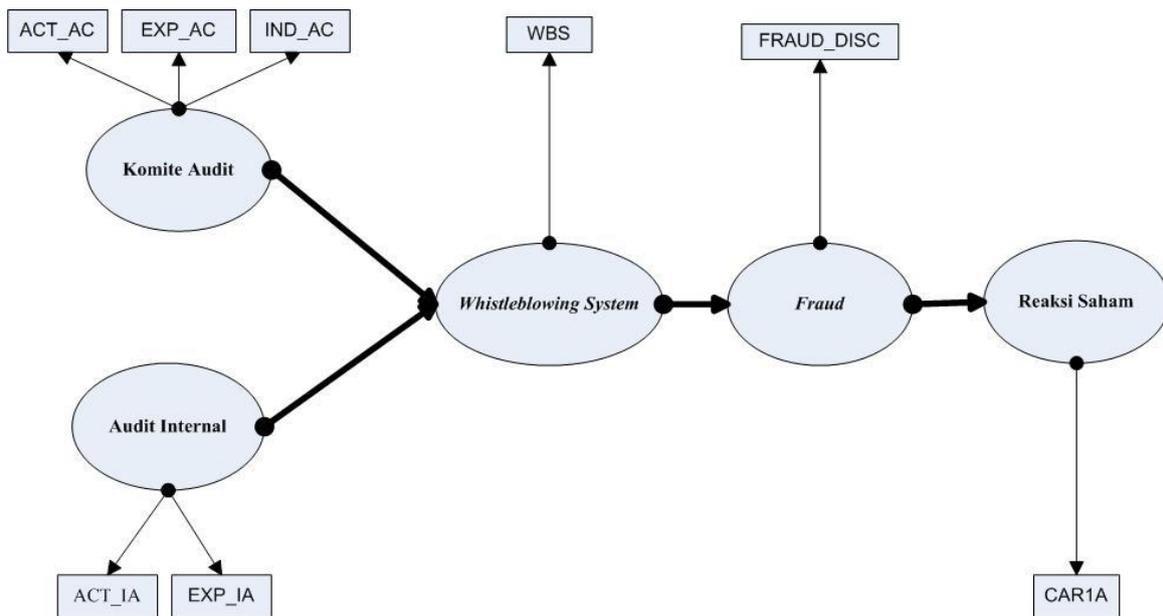
Tabel 2
Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala	Pengukuran
1	Karakteristik komite audit	Anggota yang independen (IND_AC) (Abbott et al. 2000; Zhang et al. 2007; Barua et al. 2010; Kamarudin 2014)	Rasio	$\frac{\text{IND_AC}}{\text{jumlah anggota}} \times 100\%$
		Anggota yang memiliki keahlian audit, akuntansi, atau keuangan (EXP_AC) (Huang & Thiruvadi Tanpa Tahun; Zhang et al. 2007; Barua et al. 2010; Kamarudin 2014)	Rasio	$\frac{\text{EXP_AC}}{\text{jumlah anggota}} \times 100\%$
		Pertemuan atau rapat (ACT_AC) (Huang & Thiruvadi Tanpa Tahun; Davidson 2005; Kamarudin 2014)	Rasio	ACT_AC= jumlah rapat Komite Audit yang dilaksanakan selama setahun
2	Karakteristik Audit internal	Kepala departemen audit internal yang memiliki keahlian audit, akuntansi, atau keuangan (EXP_IA) (Read & Rama 2003) (Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 496/BL/2008)	Nominal	EXP_IA= jika kepala divisi auditor internal berlatarbelakang ahli keuangan maka bernilai 1, dan jika sebaliknya maka bernilai 0
		Pelaksanaan (ACT_IA) (Shahid 2015)	Nominal	ACT_IA= jumlah pelaksanaan audit dalam setahun
3	Whistle-blowing system	Komponen laporan yang dilaksanakan (WBS) (Lee & Fargher 2012) Lihat pada Tabel 2	Rasio	$\frac{\text{WBS}}{\text{jumlah item menurut KNKG}} \times 100\%$
4	Fraud	Pengungkapan kecurangan (F) (Huang & Thiruvadi Tanpa Tahun)	Rasio	Jumlah kecurangan dilaporkan dalam periode tersebut
5	Reaksi Saham	Cumulative Abnormal Return (Day+1 dan Day+5) (CAR) (Christensen et al. 2010)	Rasio	Lihat rumus pada Tabel 3

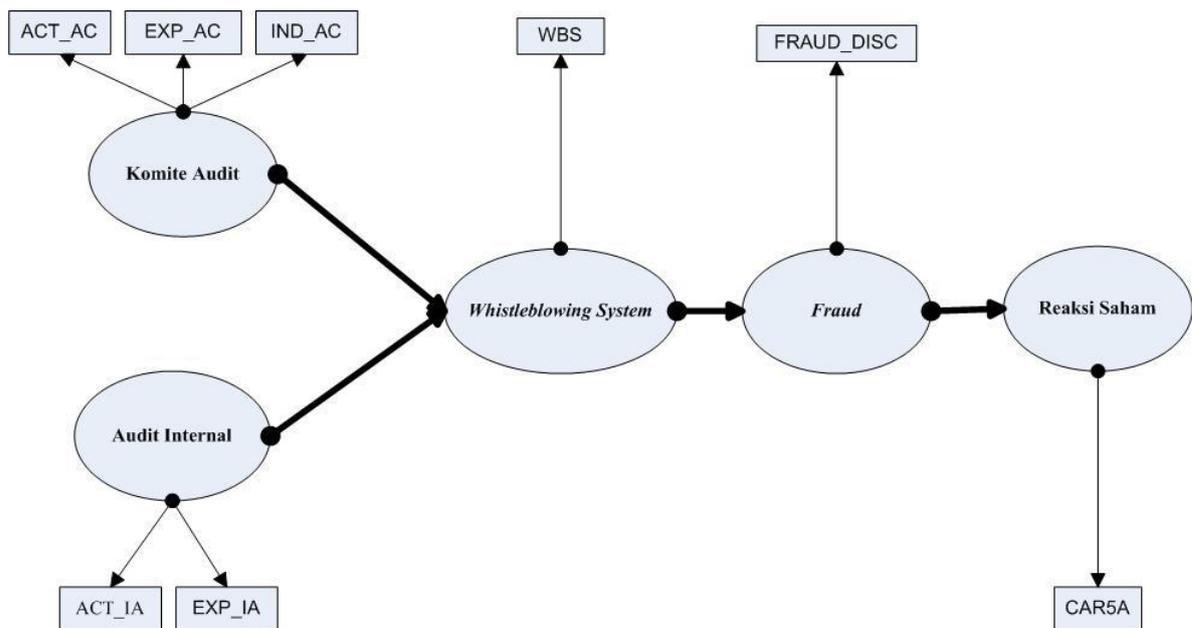
Model penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap dua model penelitian. Kedua permodelan tersebut terdapat perbedaan yaitu indikator pada variabel Reaksi Saham. Penelitian ini ingin menguji bagaimana pasar merespon pengungkapan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Respon pasar dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan dua *window* yaitu +1 dan +5, untuk melihat seberapa lama dampak

negatif yang bisa disebabkan oleh pengungkapan kecurangan ini. Pada model penelitian I, variabel Reaksi Saham menggunakan indikator *cummulative abnormal return Day+1* (CAR1A), sedangkan pada model penelitian II variabel Reaksi Saham menggunakan indikator *cummulative abnormal return Day+5* (CAR5A) sehingga kedua permodelan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Penguian Model Penelitian I



Gambar 2
Penguian Model Penelitian II

Menurut Wiyono (2011) pengujian model dalam *structural equation modeling* dengan aplikasi SmartPLS 2.0 melalui *outer model* dan *inner model* seperti pada Gambar 2. Pertama dilakukan pengujian *outer model* yaitu menguji

seberapa jauh indikator dapat menjelaskan variabelnya. Dalam pengujian *outer model* dilakukan beberapa pengujian seperti pada Tabel 4 melalui *PLS Algorithm*.

Tabel 3
Penguujian *Outer Model* dengan *PLS Algorithm*

No	Penguujian Model	Kriteria
1	<i>Convergent Validity</i>	Nilai <i>loading factor</i> minimal 0,5 sudah dianggap cukup.
2	<i>Discriminant Validity</i>	Nilai korelasi <i>cross loading</i> dengan variabelnya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel yang lainnya.
3	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Nilai AVE harus di atas 0,5
4	<i>Composite Reliability</i>	Nilai <i>composite reliability</i> yang baik apabila memiliki nilai \geq 0,7

Sumber: Wiyono (2011)

Kemudian mengeliminasi indikator-indikator tidak valid yang ditunjukkan dari hasil penguujian *outer model* dan melakukan penguujian *inner model*

dengan *PLS Algorithm* dan *Bootstraping* seperti pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Penguujian *Inner Model* dengan *Bootstraping*

No.	Penguujian Model	Kriteria
1	Q^2 untuk variabel endogen	Hasil Q^2 dengan $0 < Q^2 < 1$ mengindikasikan bahwa model memiliki nilai <i>predictive relevance</i> (baik)
2	Koefisien parameter dan t-statistik	Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan, yang diperoleh dari <i>bootstrapping</i> .

Sumber: Jaya & Sumertajaya (2008), Wiyono (2011)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data

Pada tabel 5 disajikan hasil statistik deskriptif pada masing-masing indikator untuk mengetahui nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

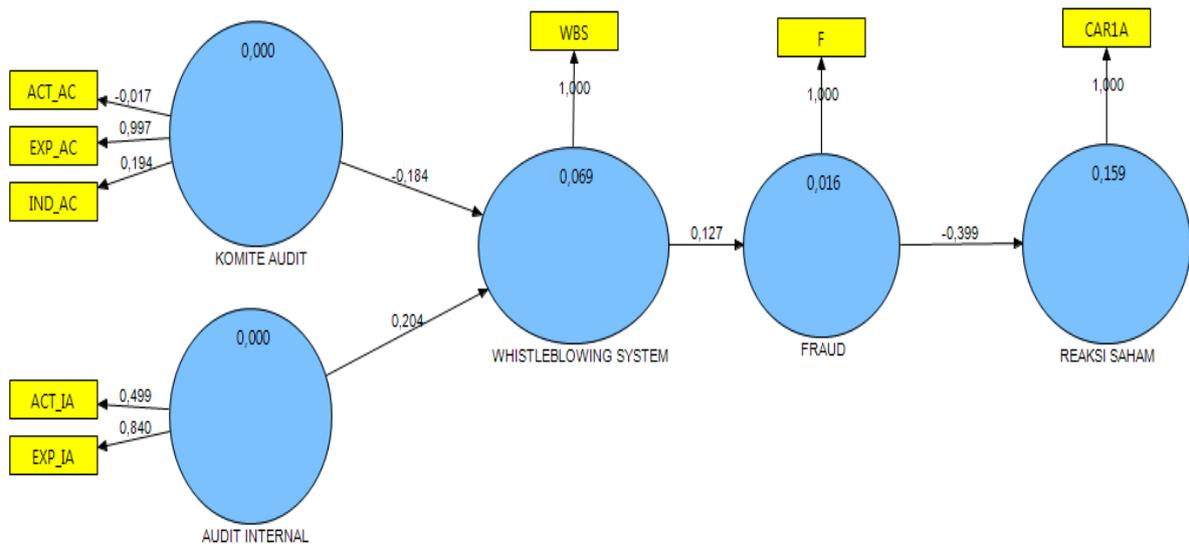
No.	Variabel	Indikator	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
1	Komite Audit	IND_AC	0,00%	100,00%	92,54%	0,169
2		EXP_AC	0,00%	100,00%	75,79%	0,255
3		ACT_AC	3	70	16,81	14,069
4	Audit Internal	EXP_IA	0	1	1	0,309
5		ACT_IA	4,00	2427,00	177,23	381,105
6	Whistleblowing System	WBS	19,00%	100,00%	60,96%	0,154
7	Fraud	F	0,00	26.652,00	484,63	3.528,115
8	Reaksi Saham	CAR1A	-0,044	0,042	-0,002	0,014
9		CAR5A	-0,357	0,693	-0,002	0,158

Sumber: Data sekunder yang telah diolah dengan *Microsoft Excel*.

Penguujian *Outer model*

Penguujian *outer model* terdiri dari empat penguujian, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, *average variance extracted (AVE)*, dan *composite reliability* (Wiyono 2011).

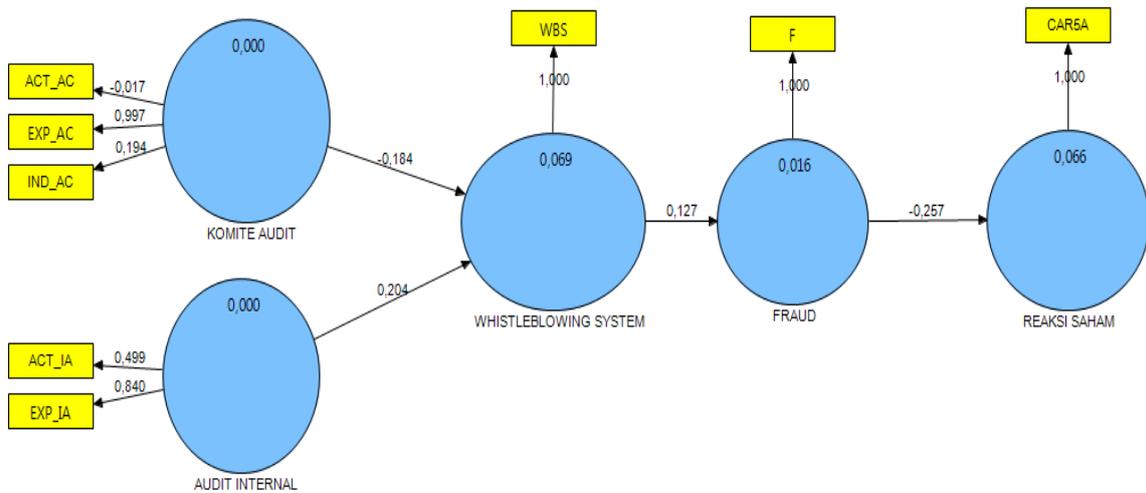
Penguujian *outer model* dilakukan melalui metode *Partial Least Square (PLS)-Algorithm* menggunakan aplikasi SMART-PLS menghasilkan model sebagai berikut:



Gambar 3

Output Model Uji Indikator dengan PLS-Algorithm pada Model Penelitian I

Sumber: Data sekunder yang telah diolah dengan SmartPLS



Gambar 4

Output Model Uji Indikator dengan PLS-Algorithm pada Model Penelitian II

Sumber: Data sekunder yang telah diolah dengan SmartPLS

Angka-angka yang muncul pada Gambar 3 dan 4 merupakan koefisien parameter hubungan antara variabel dengan masing-masing indikatornya. Selain itu diperoleh hasil pengujian

pada masing-masing model penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 6 hingga Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Indikator *Outer Loadings* (*Convergent Validity*)

Pengaruh	Hasil Uji				Kriteria
	Model Penelitian I		Model Penelitian II		
	Loading Value	Status	Loading Value	Status	
IND_AC – Komite Audit	0,194	Tidak valid	0,194	Tidak valid	
EXP_AC - Komite Audit	0,997	Valid	0,997	Valid	
ACT_AC - Komite Audit	-0,017	Tidak valid	-0,017	Tidak valid	
EXP_IA – Audit Internal	0,840	Valid	0,840	Valid	
ACT_IA - Audit Internal	0,499	Tidak valid	0,499	Tidak valid	>0,5
WBS - <i>Whistleblowing System</i>	1.000	Valid	1.000	Valid	
F – <i>Fraud</i>	1.000	Valid	1.000	Valid	
CAR1A – Reaksi Saham	1.000	Valid			
CAR5A – Reaksi Saham			1.000	Valid	

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SMART-PLS dan Microsoft Excel

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang tidak valid, karena nilai *outer loadings* kurang dari 0,5., yaitu independensi Komite Audit (IND_AC), rapat anggota Komite Audit (ACT_AC), dan pelaksanaan audit internal (ACT_IA) baik pada model penelitian I maupun model penelitian II.

Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator independensi Komite Audit (IND_AC) dan rapat Komite Audit (ACT_AC) merupakan indikator yang tidak valid pada variabel Komite Audit. Begitu pula indikator pelaksanaan audit internal (ACT_IA) juga merupakan indikator yang tidak valid pada variabel Audit Internal.

Tabel 7
Uji Indikator *Cross Loadings* (*Discriminant Validity*)

Indikator	Komite Audit	Audit Internal	Variabel			Status	Kriteria
			<i>Whistleblowing System</i>	<i>Fraud</i>	Reaksi Saham		
Model Penelitian I							Nilai korelasi <i>Cross Loading</i> antara indikator terhadap variabel-nya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi variabel lainnya.
IND_AC	0,194	0,043	-0,011	0,060	-0,066	Valid	
EXP_AC	0,997	0,103	-0,167	0,129	-0,150	Valid	
ACT_AC	-0,017	-0,346	-0,010	-0,019	0,120	Tidak valid	
EXP_IA	-0,050	0,840	0,156	0,043	-0,130	Valid	
ACT_IA	0,235	0,500	0,098	-0,042	-0,042	Valid	
WBS	-0,167	0,188	1.000	0,127	-0,048	Valid	
F	0,131	0,015	0,127	1.000	-0,399	Valid	
CAR1A	-0,45	-0,136	-0,048	-0,399	1.000	Valid	
Model Penelitian II							
IND_AC	0,194	0,043	-0,011	0,060	-0,133	Valid	
EXP_AC	0,997	0,103	-0,167	0,129	-0,175	Valid	
ACT_AC	-0,017	-0,346	-0,010	-0,019	0,019	Tidak valid	
EXP_IA	-0,050	0,840	0,156	0,043	-0,103	Valid	
ACT_IA	0,235	0,500	0,098	-0,042	-0,031	Valid	
WBS	-0,167	0,188	1.000	0,127	-0,033	Valid	
F	0,131	0,015	0,127	1.000	-0,256	Valid	
CAR5A	-0,45	-0,136	-0,048	-0,399	1.000	Valid	

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SMART-PLS dan Microsoft Excel

Hasil pengujian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat satu indikator yang tidak valid, karena nilai *cross loadings* antara indikator terhadap variabelnya lebih kecil dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel lainnya. Indikator tersebut adalah rapat Komite Audit (ACT_AC) baik pada model penelitian I maupun model penelitian II. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator rapat Komite Audit (ACT_AC) merupakan indikator yang tidak valid pada variabel Komite Audit. Treatment yang dilakukan pada variabel yang tidak valid adalah dengan mengeliminasi indikator-indikator yang tidak valid pada pengujian *discriminant validity*.

Untuk indikator komite audit yang di eliminasi adalah independensi komite audit dan rapat komite audit, sedangkan untuk indikator internal audit yang di eliminasi adalah indikator pelaksanaan audit internal. Sehingga setelah mengeleminasi indikator, maka pengujian berikutnya hanyalah indikator yang valid saja yaitu Expertise AC untuk variable karakteristik komite audit dan Expertise IA untuk variabel internal audit. Sehingga hal tersebut mengubah model penelitian ini dari Gambar 3 dan 4 menjadi gambar 5 dan 6 (Wiyono & Gendro: 2011).

Tabel 8
Uji Indikator *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Model Penelitian I		Model Penelitian II		Kriteria
	Hasil Uji	Status	Hasil Uji	Status	
Komite Audit	0,3	Tidak Reliabel	0,3	Tidak Reliabel	
Audit Internal	0,5	Tidak Reliabel	0,5	Tidak Reliabel	
<i>Whistleblowing System</i>	1,0	Reliabel	1,0	Reliabel	>0,5
<i>Fraud</i>	1,0	Reliabel	1,0	Reliabel	
Reaksi Saham	1,0	Reliabel	1,0	Reliabel	

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SMART-PLS dan Microsoft Excel

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel yang tidak reliable karena memiliki nilai AVE kurang dari 0,5. Variabel tersebut adalah Komite Audit dan Audit Internal baik pada model penelitian I maupun model penelitian II. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih variance dari indikator dapat dijelaskan, sedangkan menurut Fornell & Larker's (1981) nilai AVE yang direkomendasikan adalah lebih

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Komite Audit dan Audit Internal terbukti kurang reliable.

Menurut Latan & Ghazali (2012), nilai AVE minimal yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5 yang mempunyai arti bahwa 50% atau besar dibanding dengan korelasi kuadrat antar konstruk laten.

Tabel 9
Uji Indikator *Composite Reliability*

Variabel	Model Penelitian I		Model Penelitian II		Kriteria
	Hasil Uji	Status	Hasil Uji	Status	
Komite Audit	0,4	Kurang reliabel	0,4	Kurang reliabel	
Audit Internal	0,6	Kurang reliabel	0,6	Kurang reliabel	
<i>Whistleblowing System</i>	1,0	Reliabel	1,0	Reliabel	yang baik $\geq 0,7$
<i>Fraud</i>	1,0	Reliabel	1,0	Reliabel	
Reaksi saham	1,0	Reliabel	1,0	Reliabel	

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SMART-PLS dan Microsoft Excel

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang tidak reliabel karena memiliki nilai *composite reliability* kurang dari 0,7. Variabel tersebut adalah Komite Audit dan Audit Internal baik pada model penelitian I maupun model penelitian II. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki indikator yang kurang baik dalam mengukur variabelnya.

Dari hasil pengujian *outer model* baik pada model penelitian I dan II diketahui bahwa keahlian anggota Komite Audit (EXP_AC) merupakan indikator yang valid terhadap variabel Komite Audit. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dapat diukur dengan keahlian anggota komite audit. Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Huang & Thiruvadi (Tanpa Tahun), Zhang et al. (2007), Barua et al. (2010), dan Kamarudin (2014), sedangkan independensi Komite Audit (IND_AC) dan rapat anggota Komite Audit (ACT_AC) merupakan indikator yang tidak valid terhadap variabel Komite Audit. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang & Thiruvadi (Tanpa Tahun), Davidson et al. (2005), Abbott et al. (2000), Zhang et al. (2007), Barua et al. (2010), Lee & Fargher (2012), dan Kamarudin (2014).

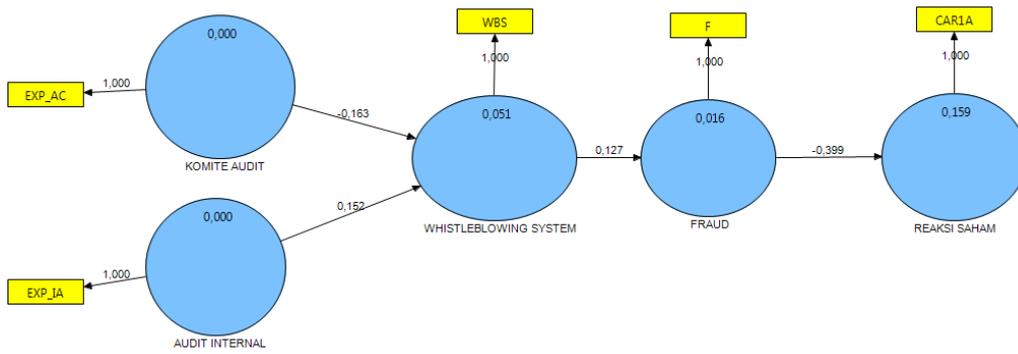
Kemudian dari hasil pengujian *outer model* baik pada model penelitian I dan II juga diketahui bahwa keahlian kepala audit internal (EXP_IA) merupakan indikator yang valid terhadap variabel Audit Internal. Hal tersebut mendukung hasil penelitian Davies (2009) yang menyatakan bahwa diperlukan suatu keahlian dalam bidang keuangan untuk mengoptimalkan kinerja audit internal perusahaan. Sedangkan pelaksanaan audit internal oleh departemen audit internal (ACT_IA)

merupakan indikator yang tidak valid terhadap variabel Audit Internal. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Perry et al. (2007) yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit investigatif oleh audit internal sangat penting untuk menanggapi setiap indikasi adanya kecurangan dalam perusahaan.

Kemudian dari hasil pengujian *outer model* baik pada model penelitian I dan II juga diketahui bahwa terdapat hubungan yang valid antara indikator tunggal terhadap variabelnya. Hubungan tersebut diantaranya pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS) dengan variabel *Whistleblowing System*, pengungkapan kecurangan (F) dengan variabel *Fraud, Cumulative Abnormal Return Day+1* (CAR1A) dengan Reaksi Saham, dan *Cumulative Abnormal Return Day+5* (CAR5A) dengan Reaksi Saham.

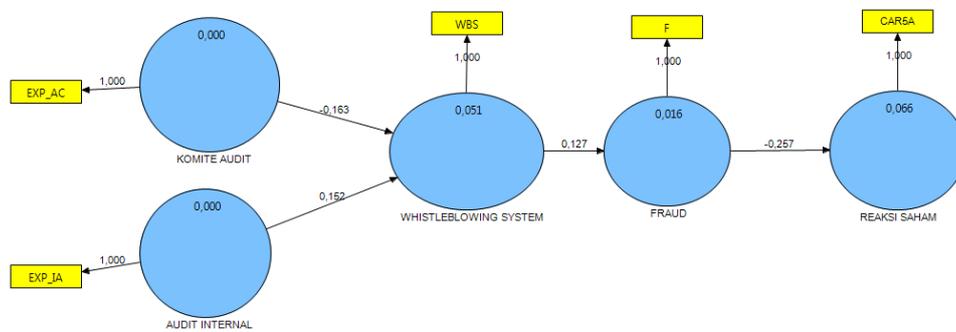
Pengujian Hipotesis

Dari hasil uji *outer model* diperoleh satu indikator efektifitas komite audit dan satu indikator efektifitas internal audit yang valid. Indikator karakteristik komite audit yang valid adalah Keahlian akuntansi, audit dan keuangan anggota komite audit (EXP_AC), sedangkan indikator yang valid untuk pengukuran karakteristik audit internal adalah keahlian akuntansi, audit atau keuangan (EXP_IA). Kemudian indikator-indikator yang valid inilah yang digunakan dalam pengujian berikutnya yaitu uji *inner model*. Pengujian *inner model* dilakukan untuk memperoleh nilai koefisien determinasi Q^2 dan koefisien parameter melalui metode *Partial Least Square* (PLS)-*Algorithm*, serta t-statistik melalui metode *Bootstrapping*. Hasil dari pengujian *inner model* adalah sebagai berikut:



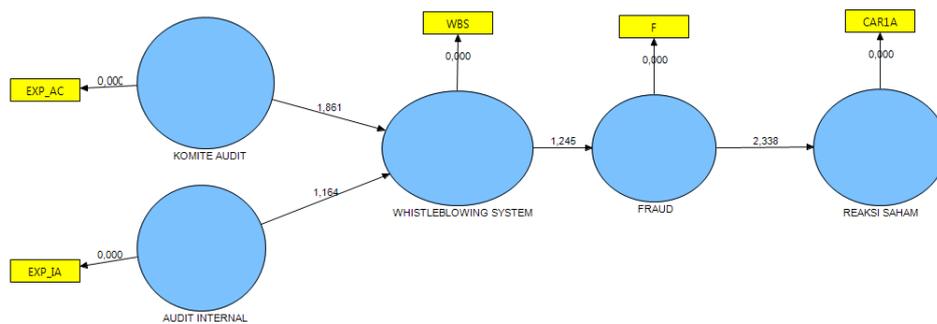
Gambar 5 Output Model PLS-Algorithm model penelitian I

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SmartPLS



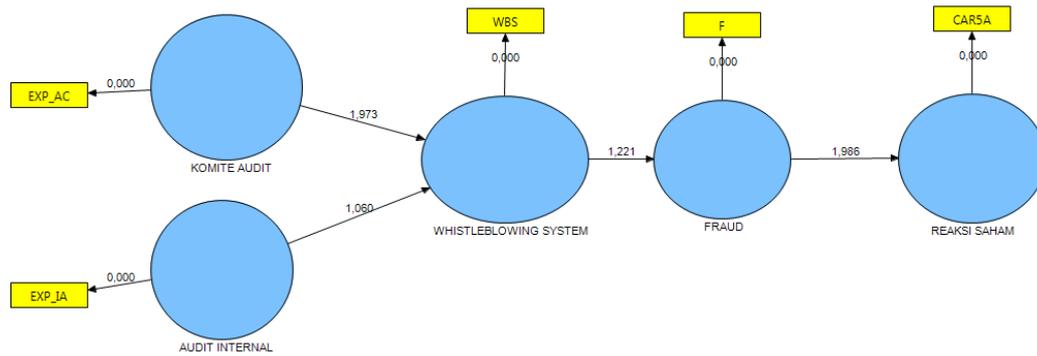
Gambar 6 Output Model PLS-Algorithm pada penelitian II

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SmartPLS



Gambar 7 Output model Bootsrapping model penelitian I

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SmartPLS



Gambar 8 Output model bootstrapping model penelitian II

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan SmartPLS

Nilai R^2 pada variabel endogen pada output model PLS-Algorithm digunakan untuk menghitung koefisien determinasi Q^2 . Hasil

penghitungan koefisien determinasi Q^2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10
Pengujian Koefisien Determinasi Q^2

Model Penelitian I		Model Penelitian II		Kriteria
Q^2	Keterangan	Q^2	Keterangan	
0,214	<i>predictive relevance</i>	0,128	<i>predictive relevance</i>	$0 < Q^2 < 1$

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan Microsoft Excel

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa baik model penelitian I maupun model penelitian II merupakan model yang baik. Kemudian hasil pengujian koefisien paramater dari output model

PLS-Algorithm dan nilai t-statistik dari output model Bootstrapping dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Pengujian Koefisien Parameter dan t-statistik

Hubungan Variabel	Pengujian					
	Model Penelitian I			Model Penelitian II		
	Koefisien Parameter	t-statistik	Keterangan	Koefisien Parameter	t-statistik	Keterangan
Komite Audit – Whistleblowing System	-0,163	1,861	Negatif; Signifikan	-0,163	1,973	Negatif; Signifikan
Audit Internal – Whistleblowing System	0,152	1,164	Tidak signifikan	0,152	1,06	Tidak Signifikan
Whistleblowing System – Fraud	0,127	1,245	Tidak Signifikan	0,127	1,221	Tidak Signifikan
Fraud – Reaksi Saham	0,399	2,388	Negatif; Signifikan	-0,257	1,986	Negatif; Signifikan

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah dengan Microsoft Excel

Pembahasan

Pengaruh Karakteristik komite audit terhadap Pelaksanaan Whistleblowing System

Dari hasil uji t-statistik pada Tabel 11, pengaruh variabel Komite Audit terhadap variabel *Whistleblowing System* signifikan pada taraf kesalahan 5% (T-tabel dengan signifikansi 5% dan DF=53, adalah sebesar 1,674) yaitu sebesar 1,861 pada model penelitian I dan 1,973 pada model penelitian II. Kemudian hasil uji koefisien parameter menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,163 baik pada model penelitian I maupun model penelitian II. Dengan demikian H1 ditolak, sehingga karakteristik komite audit berpengaruh negatif pada pelaksanaan *whistleblowing system*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Karakteristik komite audit tidak dapat meningkatkan pelaksanaan *whistleblowing system* dalam perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena *whistleblowing system* merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan. Dalam suatu perusahaan, internal audit merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas efektifitas pengendalian internal, sedangkan komite audit hanya berfungsi menerima laporan dari hasil pekerjaan audit internal atas pemeriksaan efektifitas pengendalian internal perusahaan. Jika komite audit turun secara langsung dalam pelaksanaan *whistleblowing system* dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan fungsi yang dapat menyebabkan *whistleblowing system* ini tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Lee & Fargher (2012) yang menyebutkan bahwa pengungkapan kecurangan melalui *whistleblowing system* berhubungan dengan jumlah anggota independen dalam komite audit.

Pengaruh Karakteristik Audit Internal terhadap Pelaksanaan Whistleblowing System

Dari hasil uji t-statistik pada Tabel 11, pengaruh variabel Audit Internal terhadap variabel *Whistleblowing System* signifikan pada taraf kesalahan 5% (T-tabel dengan signifikansi 5% dan

DF=53, adalah sebesar 1,674) yaitu sebesar 1,164 pada model penelitian I dan 1,060 pada model penelitian II. Kemudian hasil uji koefisien parameter menunjukkan koefisien positif sebesar 0,152 baik pada model penelitian I maupun model penelitian II. Dengan demikian H2 ditolak, sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh antara karakteristik audit internal terhadap penerapan *whistleblowing system*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik audit internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *whistleblowing system*. Hal penelitian ini tidak mampu membuktikan hasil penelitian Read & Rama (2003) dan Shahid (2015) yang menunjukkan bahwa fungsi audit internal merupakan struktur perusahaan yang paling efektif dalam menangani kasus kecurangan melalui *whistleblowing system*. Menurut survei yang dilakukan oleh Shahid (2015) terhadap responden auditor internal perusahaan-perusahaan di Pakistan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara audit internal dengan pelaksanaan *whistleblowing system*. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham memiliki pengendalian internal yang baik sehingga pelaksanaan *whistleblowing system* selalu dilakukan evaluasi.

Perbedaan dalam penelitian ini diduga karena fungsi internal audit merupakan bagian dari komite audit. Dalam suatu perusahaan tugas utama dari fungsi internal audit adalah menguji dan mengevaluasi pengendalian internal suatu perusahaan, tidak secara khusus menangani penerapan *whistleblowing system* perusahaan.

Pelaksanaan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Kecurangan

Hasil uji t-statistik pada Tabel 11, pengaruh variabel Whistleblowing System terhadap variabel Fraud signifikan pada taraf kesalahan 5% (T-tabel dengan signifikansi 5% dan DF=53, adalah sebesar 1,674) yaitu sebesar 1,245 pada model penelitian I dan 1,221 pada model penelitian II. Kemudian hasil uji koefisien parameter

menunjukkan koefisien positif sebesar 0,127 baik pada model penelitian I maupun model penelitian II. Dengan demikian H3 ditolak, sehingga pelaksanaan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan kecurangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Hal tersebut tidak dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2014) dan Robinson et al. (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2014) merupakan olah data hasil wawancara terhadap para bankir di Malaysia mengenai *whistleblowing system* sebagai mekanisme pencegahan praktik penyalahgunaan aset. Karena pengukuran variabel kecurangan dalam penelitian ini diukur dari jumlah kecurangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan, hal ini memungkinkan jumlah kecurangan yang diungkapkan lebih sedikit karena perusahaan telah memiliki kebijakan-kebijakan internal dalam melakukan pencegahan kecurangan dan mensosialisasikan kode etik perusahaan secara lebih intens. Dari sudut pandang perusahaan pengungkapan kecurangan dalam laporan tahunan perusahaan merupakan bagian dari *bad news* yang biasanya jarang diungkapkan oleh perusahaan karena dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehingga ketika perusahaan memperoleh laporan praktik kecurangan, perusahaan bersikap proaktif dalam menyelesaikan kasus dan melakukan tindakan pencegahan untuk terjadinya kecurangan berikutnya dengan sosialisasi kode etik secara lebih baik. Sedangkan menurut Robinson et al. (2012) pegawai lebih nyaman melaporkan praktik *wrongdoing* daripada melaporkan praktik kecurangan.

Pengungkapan kecurangan terhadap Reaksi Pasar

Hasil uji t-statistik pada Tabel 11, pengaruh variabel *Fraud* terhadap variabel Reaksi Saham signifikan pada taraf kesalahan 5% (T-tabel

dengan signifikansi 5% dan DF=53, adalah sebesar 1,674) yaitu sebesar 2,388 pada model penelitian I dan 1,986 pada model penelitian II. Kemudian hasil uji koefisien parameter menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,399 pada model penelitian I dan koefisien negatif -0,257 pada model penelitian II. Dengan demikian H4 diterima, sehingga pengungkapan kecurangan berpengaruh negatif pada reputasi perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan kecurangan dapat menurunkan reaksi pasar perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farber (2005) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang terindikasi adanya kecurangan merupakan perusahaan yang lemah dalam pengendalian internal dan berdampak pada kredibilitas perusahaan sehingga pasar bereaksi negatif terhadap adanya pengungkapan praktik kecurangan dalam perusahaan. Kemudian adanya upaya perbaikan internal perusahaan untuk mencegah kecurangan dapat mengembalikan kepercayaan investor. Penelitian lain yang sejalan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Christensen (2010) tentang pengaruh hasil investigasi kasus kecurangan terhadap reaksi pasar saham perusahaan di Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penurunan *abnormal return* harga saham terjadi sehari sebelum dan sesudah adanya pengumuman kecurangan dalam perusahaan. Selain itu *abnormal return* harga saham semakin menurun pada saat sehari sebelum dan sesudah pengumuman hasil investigasi kasus kecurangan oleh SEC (*The Securities and Exchange Commission*). Sebaliknya, *abnormal return* harga saham pada saat dua hari hingga sepuluh hari sebelum dan dua hari hingga lima hari setelah pengumuman kecurangan menunjukkan hasil yang lebih baik. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brazel et al. (2015) yang melakukan survei kepada para investor untuk mengetahui hubungan antara persepsi investor

terhadap pengungkapan kecurangan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa investor menggunakan penilaian risiko dengan menggunakan *fraud red flags* sebagai penentu pengambilan keputusan untuk menghindari investasi yang berpotensi kecurangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa investor dalam jangka waktu tertentu akan tetap bereaksi negatif terhadap pengungkapan kecurangan di perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan pada CAR5A (*cummulative abnormal return day+5*) hubungan pengungkapan kecurangan dengan reaksi saham perusahaan masih signifikan negatif. Sehingga perusahaan diharapkan segera menunjukkan upaya perbaikan untuk mengembalikan kepercayaan para investor. Hal ini terkait dengan karakteristik investor di Indonesia yang cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi di pasar saham. Praktik pengungkapan kecurangan di Indonesia merupakan sesuatu yang sensitif dalam pandangan para investor di Indonesia. Sehingga perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang handal dan segera melakukan perbaikan jika terjadi indikasi terjadinya kecurangan sebelum pasar mengetahuinya.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Komite Audit terhadap *whistleblowing system*, audit internal terhadap *whistleblowing system*, *whistleblowing system* terhadap *fraud*, dan *fraud* terhadap reputasi perusahaan. Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka terdapat empat hal yang disimpulkan antara lain:

- a) Karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan *whistleblowing system* suatu perusahaan. Karakteristik audit internal tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *whistleblowing system*.
- b) Pelaksanaan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan.

- c) Pengungkapan kecurangan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap reputasi perusahaan baik pada window +1 maupun +5. Sehingga perusahaan yang terungkap adanya kecurangan akan berdampak pada penurunan reaksi saham.

Implikasi dari hasil penelitian ini bagi pemerintah adalah untuk mendorong pelaksanaan *whistleblowing system* di setiap perusahaan sebagai perangkat pelaporan kecurangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan investor di Indonesia. Pengungkapan kecurangan pada *annual report* perusahaan akan semakin meningkatkan transparansi informasi perusahaan kepada para stakeholder khususnya para investor. Penelitian ini juga menemukan bahwa reaksi pasar negatif semakin berkurang setelah 5 hari dari tanggal pelaporan kecurangan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa investor percaya perusahaan akan melakukan tindakan perbaikan dari terungkapnya kecurangan yang terjadi dipersuahaan. Kemudian terdapat keterbatasan dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Pertama, pengungkapan *whistleblowing system* bersifat sukarela sehingga data yang kami peroleh terbatas pada perusahaan yang melakukan pengungkapan *whistleblowing system* dalam laporan tahunan perusahaan. Kedua, penilaian *whistleblowing system* hanya pada poin-poin yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Ketiga, pelaporan kecurangan bersifat sukarela dan memiliki efek buruk bagi perusahaan sehingga terbatas pada jumlah yang dilaporkan. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pengujian secara tidak langsung antara karakteristik komite audit dengan pelaksanaan *whistleblowing system* melalui efektifitas internal audit.

Daftar Pustaka

- Abbott, L.J., Park, Y., & Parker, S. (2000). The effects of audit committee activity

- independence on corporate fraud. *Journal of Managerial Finance*, 26(11), 55-67.
- ACFE. (2014). *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin.
- Ali, A. A. R. (2014). Corporate governance: The role and effectiveness of the audit committee in Bahrain. *International Journal of Business and Management*, 9(3), 131-137.
- American Institute of Certified Public Accountant. (2002). *Statement of Auditing Standards: Consideration of Fraud in a financial statement*. AICPA: New York.
- Association of Certified Fraud Examiners & Ernst and Young. (2016). *Survey Fraud Indonesia*. Association of Certified Fraud Examiners & Ernst and Young: Surabaya.
- Barua, A., Rama, D.V. & Sharma V.(2010). Audit committee characteristics and investment in internal auditing. *Journal of Account Public Policy*, 29, 503-513.
- Bhana, N. (2010). The stock market reaction to criticism of corporate governance practice of companies listed on the JSE, *Investment Analyst Journal*, 72, 1-12.
- Brazel, J.F., Lones, K.L., Thayer, J., & Warne, R.C. (2015). Understanding investor perceptions of financial statement fraud and their use of red flags: Evidence from the Field, *Review of Accounting Studies*, 20(4), hal. 1373-1406.
- Brown, S. J., & Warner, J. B. (1980). Measuring security price performance. *Journal of Financial Economics*, 8, 205-258.
- Budiyanto, A., Ismani, & Ngadirin. (2006). Analisis Trading Volume Activity (TVA) dan abnormal return pada saham perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan setelah bergabung dengan JII, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(1), 42-54.
- Bursa Efek Indonesia. Diakses dari www.idx.co.id pada tanggal 11 April 2016, <www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaan-tercatat/laporankeuangandantahunan.asp>
- Bursa Efek Indonesia. Diakses dari www.idx.co.id pada tanggal 25 April 2016, <www.idx.co.id/id-id/beranda/unduhdata/ringkasan.aspx>
- Chartered Institute of Internal Auditors. (2014). *Whistleblowing and corporate governance, the role of internal audit in whistleblowing*. London.
- Christensen, T.E., H.Paik, G.D., & William, C.D. (2010). Market efficiency and investor reaction fraud investigation. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 2(3), 1-30.
- Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting and Finance*, 48, 543-559.
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free press: Glenloe, IL.
- Davies, M. (2009). Effective working relationships between audit committees and internal audit: The cornerstone of corporate governance in local authorities, a welsh perspective. *Journal of Management Governance*, 13, hal. 41-73.
- Davidson, R., Stewart, J.G., & Kent, P. (2005). Internal governance structure and earnings management. *Accounting and Finance*, 45, 241-267.
- Ernst & Young. (2012). *Fraud incident handling management, meeting the challenges of fraud*. Jakarta.
- Ernst & Young. (2012). *Fraud risk management, preventing, deterring and detecting fraud does your company have an anti-fraud program*. Jakarta.
- Ernst & Young. (2012). *The Sarbanes-Oxley Act at 10, enhancing the reliability of financial reporting and audit quality*. Jakarta.
- Farber, D. B. (2005). Restoring trust after fraud does corporate governance matter?. *The Accounting Review*, 80(2), 539-561.
- Firth, M., Rui, O.M., & Wu, W. (2011). Cooking the books: Recipe and cost of falsified financial statement in China. *Journal of Corporate Finance*, 17(2), 371-390.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2000). *Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan)*, ed.2. Jakarta.

- Global Corporate Governance Forum. (2007). *Whistleblowing: Recent development and implementation issues*. Washington DC.
- Huang, H. W., & Thiruvadi, S. (Tanpa Tahun). Audit committee characteristic and corporate fraud. *International Journal*.
- Hui, K. W. (2014). The market's valuation of fraudulently reported earnings. *Journal of Business Finance and Accounting*, 41(5), 627-651.
- Jaya, I. G. N. M., & Sumertajaya, I. M. (2008). *Pemodelan persamaan struktural dengan Partial Least Square*, Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika, 118-132.
- Kamarudin, K. A., & Ismail, W. A. W. (2014). The effect of audit committee attributes on fraudulent financial reporting. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(5), 507-514.
- Khan, M.A.B.M.K., Anuar, B.N., & Mahzan, N.D. (2014). The intervening effects of whistleblowing in reducing the risk of asset misappropriation. *Journal of Business and Economics*, 5(10), 1929-1939.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*. Jakarta.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lee, G., & Fargher, N. (2012). Companies' use of whistle-blowing to detect *journal managerial finance* fraud: an examination of corporate whistle-blowing policies. *Journal of Business Ethics*, 114, 283-295.
- McKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35, 13-39.
- National Audit Office. (2014). *Making a whistleblowing policy work*. London.
- Perks, S., & Smith, E.E. (Tanpa Tahun). Employee perceptions regarding whistleblowing in the workplace: A South African perspective. *Journal of Human Resource Management*, 6(2), 15-24.
- Perry, L.M, & Bryan, B.J. (1997). Heightened responsibilities of the internal auditor in the detection of fraud. 23(12), 38-43.
- Pillay, S., et al. (2012). Exploring whistleblowing intentions in South Africa: A quantitative analysis. *African Journal of Business Management*, 6(7), 2259-2548.
- Protiviti. (2009). *guide to internal audit frequently asked questions about developing and maintaining an effective internal audit function*. Retrieved from www.protiviti.com.
- Read, W. J., & Rama, D. V. (2003). Whistleblowing to internal auditors, *Managerial Auditing Journal*, 18(5), 354-362.
- Robinson, S., Robertson, J.C., & Curtis, M.B. (2012). The effects of contextual and wrongdoing attributes on organizational employees' whistleblowing intentions following fraud. *Journal of Business Ethics*, 106, 213-227.
- Sanusi, Z.M., Mohamed, N., Omar, N., & Daniel, M.M.N. (2015). Effects of internal control, fraud motives and experience in assessing likelihood of fraud risk. *Journal of Economics, Business And Management*, 3(2), 194-200.
- Shahid, A. U. (2015). A descriptive study of association of whistle blowing activities and auditing practices in listed companies of Lahore Stock Exchange. *American Journal of Economics, Finance and Management*, 1(3), 136-152.
- Veronica, S.S., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 22(3), 329-346.
- Waldron, N. (2012). The effectiveness of hotlines in detecting and deterring malpractice in organisations.
- Wiyono, G. (2011). *Merancang penelitian bisnis, dengan alat analisis SPSS 17.0 and SmartPLS 2.0*, Edisi Pertama. STIM YKPN Yogyakarta: Yogyakarta.
- Zhang, Y., Zhou, J., & Zhou, N. (2007). Audit committee quality, auditor independence, and internal control weakness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 300-327.
- Zvavahera, P., & Ndoda, G.R. (2014). Corporate governance and ethical behaviour: the case

of Zimbabwe Broadcasting Corporation;
Journal of Academic and Business Ethics, 9.

Lampiran

Tabel 2
Komponen Pelaporan *Whistleblowing System*

No.	Item Pelaporan <i>Whistleblowing System</i>
1	Komitmen pembentukan budaya kepatuhan dan kode etik (<i>Compliance and Ethics programme</i>).
2	Komitmen pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> .
3	Pernyataan alasan, manfaat, dan pentingnya <i>whistleblowing system</i> .
4	Penjelasan prosedur <i>whistleblowing system</i> .
5	Penjelasan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam <i>whistleblowing system</i> .
6	Penjelasan siapa sajakah yang dapat memanfaatkan <i>whistleblowing system</i> .
7	Panduan laporan yang benar-benar berupa pelanggaran dan seberapa banyak laporan yang diterima.
8	Penegasan bahwa pelaporan yang bersifat fitnah atau palsu tidak akan diproses dan bahkan akan diberi sanksi bila terbukti demikian.
9	Pernyataan perusahaan bahwa pelapor dan laporannya akan dijamin kerahasiannya dan keamanannya.
10	Pernyataan komitmen perusahaan untuk melindungi pelapor (<i>Whistleblower Protection Policy</i>).
11	Pernyataan bahwa pelapor akan menerima kabar mengenai proses penanganan laporan pelanggaran yang telah disampaikan.
12	Penjelasan mengenai hak-hak pelapor terkait dengan proses yang terjadi akibat pelaporan pelanggaran yang disampaikannya (permohonan relokasi, anonimitas, cuti, serta hak dalam hukum).
13	Penjelasan proses investigasi yang dilakukan perusahaan.
14	Penjelasan mengenai diperbolehkannya anonimitas.
15	Komitmen bahwa melakukan penunjukan petugas penanganan <i>whistleblowing system</i> .
16	Komitmen untuk senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> .

Sumber: Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran–SPP (*Whistleblowing System–WBS*) oleh KNKG 2008.

Tabel 3
Tahapan Penghitungan *Cummulative Abnormal Return*

No.	Tahapan penghitungan <i>Cummulative Abnormal Return</i>	Rumus Perhitungan	Keterangan
1	<i>Actual Return</i>	$R_{it} = \frac{P_{it} - P_{itx}}{P_{itx}}$	R_{it} : <i>Actual Return</i> saham i pada hari t P_{it} : Harga saham i pada hari t P_{itx} : Harga saham i pada hari t-x hari E_{it} : <i>Expected Return</i> PM_{it} : Harga indeks saham i pada hari t
2	<i>Expected Return</i> ; menggunakan model <i>market adjusted model</i>	$E_{it} = \frac{PM_{it} - PM_{itx}}{PM_{itx}}$	PM_{itx} : Harga indeks saham i pada hari t-x hari AR_{it} : <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari t $CAR1A$: <i>Cummulative Abnormal Return Day+1</i> $CAR5A$: <i>Cummulative Abnormal Return Day+5</i>
3	<i>Abnormal Return</i>	$AR_{it} = R_{it} - E_{it}$	$AR_{i(h-0)}$: <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari 0 atau hari publikasi laporan tahunan perusahaan $AR_{i(h+1)}$: <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari ke 1 setelah publikasi laporan tahunan perusahaan
4	<i>Cummulative Return Day+1</i>	$CAR1A = AR_{i(h-0)} + AR_{i(h+1)}$	$AR_{i(h+2)}$: <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari ke 2 setelah publikasi laporan tahunan perusahaan $AR_{i(h+3)}$: <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari ke 3 setelah publikasi laporan tahunan perusahaan $AR_{i(h+4)}$: <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari ke 4 setelah publikasi laporan tahunan perusahaan
5	<i>Cummulative Return Day+5</i>	$CAR5A = AR_{i(h-0)} + AR_{i(h+1)} + AR_{i(h+2)} + AR_{i(h+3)} + AR_{i(h+4)} + AR_{i(h+5)}$	$AR_{i(h+5)}$: <i>Abnormal Return</i> saham i pada hari ke 5 setelah publikasi laporan tahunan perusahaan

Sumber: McKinley (1997), Christensen et al. (2010), Budiyanto et al. (2016)